

Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina

Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono
Universitas Gadjah Mada
School of Government & Public Policy (SGPP)
e-mail : tryananto.wicaksono@gmail.com

Abstract

The United Arab Emirates (UAE) and Israel have signed a normalization agreement called Abraham Accord on September 15, 2020. This agreement indicates that previously both countries had a reasonably good relationship and a series of cooperation. This study aims to see the UAE's interests toward Israel and how other Muslim countries respond to the agreement, which will impact their solidarity for Palestine's independence. In this research, the writer uses realism perspective, which includes the concept of national interest, the theory of balance of power, and the concept of normalization. The results showed that the UAE has an interest in expanding cooperation with Israel in various fields, especially in the political, economic, and security. The UAE made this policy because they feel threatened by Iran and because of the COVID-19 pandemic. This policy received positive response from Egypt, Jordan, Bahrain, and Sudan; and negative feedbacks from Oman, Iran, Turkey, and Qatar. Especially for Palestine itself, this agreement is a severe blow to the country's sovereignty struggle.

Keywords: *balance of power, Israel, national interest, normalization, United Arab Emirates*

Abstrak

Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel telah menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dalam sebuah perjanjian yang disebut Abraham Accord pada 15 September 2020. Hal tersebut menandakan bahwa sebelumnya kedua negara telah memiliki hubungan yang cukup baik dan memiliki jalinan rangkaian kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kepentingan UEA terhadap Israel dan bagaimana respons negara-negara Muslim lainnya terkait kesepakatan tersebut, yang tentu saja akan berdampak terhadap solidaritas mereka dalam

memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif realisme yang meliputi konsep kepentingan nasional, teori *balance of power*, dan konsep normalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UEA memiliki kepentingan untuk memperluas kerja samanya dengan Israel di berbagai bidang, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. UEA membuat kebijakan ini karena merasa terancam oleh Iran dan karena adanya pandemi COVID-19. Kebijakan ini menuai respons positif dari Mesir, Yordania, Bahrain, dan Sudan; dan tanggapan negatif dari Oman, Iran, Turki, dan Qatar. Khusus bagi Palestina sendiri, hal ini menjadi sebuah pukulan berat bagi perjuangan kedaulatan negaranya.

Kata kunci: *balance of power*, Israel, kepentingan nasional, normalisasi, Uni Emirat Arab

Pendahuluan

Hubungan diplomatik antar negara dapat tercipta jika mereka sebelumnya telah memiliki hubungan yang baik serta memiliki jalinan rangkaian kerja sama. Wujud dari hubungan diplomatik biasanya dibuktikan melalui pembukaan kantor kedutaan dan pengiriman masing-masing diplomat dari masing-masing negara. Dalam konteks hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA), pada 13 Agustus 2020 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perjanjian yang disebut dengan "Perjanjian Abraham" (Abraham Accord). Isi dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan perdamaian untuk normalisasi hubungan antara Israel dan UEA. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di Gedung Putih pada 15 September 2020 oleh Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan UEA yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Abdullah bin Zayed al-Nahyan.

Sebelum UEA, dua negara Arab lainnya, yaitu Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994 juga telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, UEA menjadi negara Arab ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Masih pada tahun 2020, Bahrain juga kemudian mengikuti langkah UEA sehingga negara Teluk itu menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan antara UEA dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham sebenarnya belum bisa dikonfirmasi sebagai putusan akhir, karena masih ada beberapa isu yang harus dinegosiasikan sebelum kesepakatan akhir ditandatangani.

Meski demikian, ada beberapa aspek utama yang telah disepakati oleh kedua negara: (1) UEA dan Israel setuju untuk membangun hubungan bilateral ekonomi dan diplomatik penuh, yang dikenal sebagai "normalisasi". Delegasi dari kedua negara diumumkan akan bertemu (setelah penandatanganan di bulan Agustus) dalam upaya penandatanganan perjanjian mengenai investasi, keamanan, pariwisata, penerbangan langsung, dan persetujuan-persetujuan lainnya; (2) AS, Israel, dan UEA akan mengimplementasikan sebuah agenda strategis untuk kawasan Timur Tengah dalam rangka memperluas kerja sama diplomatik, perdagangan, dan keamanan; (3) Israel akan menunda rencananya untuk melakukan ekspansi pada bagian Tepi Barat (West Bank) Palestina demi fokus pada normalisasi dengan UEA; (4) Memberikan hak bagi warga UEA untuk dapat mengunjungi dan beribadah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur (Haaretz, 2020).

Perjanjian ini mendapat respons yang beragam dari masyarakat internasional. Beberapa negara menyambut baik perjanjian ini, mereka termasuk Kanada, Inggris, Mesir, dan Bahrain. Namun tidak sedikit juga yang mengkritiknya, seperti Oman, Iran, Turki, dan Qatar. Kanada sendiri menyebut perjanjian ini sebagai langkah yang positif untuk menuju perdamaian dan keamanan bagi kawasan (Sevunts, 2020). Sementara itu beberapa kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi di UEA, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman memprotes kesepakatan tersebut (Al Monitor, 2020).

Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemudian merespons dengan mengumpulkan para pemimpin Palestina, termasuk pimpinan Komite Pusat Fatah dan Komite Eksekutif Palestine Liberation Organization (PLO). Hasilnya adalah, otoritas Palestina di Tepi Barat dan kepemimpinan Hamas di Gaza mengeluarkan penolakan penuh atas keputusan UEA. Bahkan, PLO menarik Duta Besarnya untuk Abu Dhabi dan menyeru kepada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak kesepakatan tersebut (Barron, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui penelitian ini penulis bermaksud mengidentifikasi kepentingan UEA terhadap Israel serta menganalisis respons negara-negara Muslim lainnya terkait kebijakan tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap solidaritas negara-negara Muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa riset sebelumnya terkait kajian Timur Tengah dan Israel. Teitelbaum (2009) membahas mengenai Arab Peace Initiatives (Prakarsa Perdamaian Arab) yang merupakan suatu bentuk inisiatif negara-negara Arab untuk menciptakan normalisasi hubungan dengan Israel dengan harapan bahwa hal ini dapat memberikan prospek perkembangan yang

positif di kawasan Timur Tengah. Kajian ini juga menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan negara-negara Arab untuk bekerja sama dengan Israel adalah adanya ancaman eksternal seperti dari Iran, kelompok separatis, dan teroris di kawasan negara-negara Arab di Teluk Persia (meliputi Bahrain, Kuwait, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA). Oded Eran (2011) menjelaskan proses normalisasi yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania dengan Israel. Gadi Hitman dan Chen Kertcher (2018) menemukan bahwa Arab Saudi dan Qatar telah membuat sebuah kebijakan dan model kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan normalisasi hubungan dengan Israel, serta pola hubungan yang telah terjalin antara Arab Saudi dan Qatar dengan Israel. Inti dari penelitian ini ialah upaya Arab Saudi dan Qatar untuk mengimbangi kekuatan Iran, sehingga memunculkan suatu kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel (Hitman & Kertcher, 2018). Sementara itu, penelitian ini akan memfokuskan pada normalisasi UEA dan Israel dalam perspektif realisme, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, *teori balance of power*, dan konsep normalisasi.

Teori Realisme dalam Hubungan Internasional

Untuk menjelaskan perilaku aktor, penulis menggunakan pendekatan Teori Realisme yang berpendapat bahwa negara selalu terlibat dalam suatu perebutan kekuasaan, sebagai hasil dari keinginan untuk bertahan dan mendominasi negara lain. Maka, hal yang terpenting bagi negara adalah kekuasaan. Politik internasional adalah tentang kekuasaan, dan setiap negara berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Morgenthau, 2006). Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan militer, namun hal ini masih dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu (Burchill, 2005: 36). Melalui sudut pandang ini, maka kita dapat melihat bahwa suatu negara akan terus termotivasi untuk menjadi kekuatan terbesar, yang mana pada akhirnya dapat memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi negara lain.

Masih berkaitan dengan pendekatan realisme, penulis menggunakan konsep klasik dalam teori Hubungan Internasional (HI), yaitu "kepentingan nasional". Konsep ini menjadi kata kunci yang paling penting bagi kaum realis yang memang sangat percaya pada kedaulatan negara sebagai satu-satunya aktor dalam HI. Perspektif realisme mengenai kepentingan nasional menjelaskan HI "as it is" (sebagaimana adanya) dengan pandangan anarkis Hobbesian, yaitu ketika negara mengatur dirinya sendiri dan mereka selalu dihantui rasa kecurigaan terhadap negara lainnya. Maka dalam konteks ini, politik internasional selalu dilihat dalam keadaan anarkis (Burchill, 2005). Pandangan ini melihat bahwa kepentingan nasional adalah sesuatu yang utama dan direpresentasikan oleh negara. Berkaitan dengan penjelasan Burchill sebelumnya, maka setiap negara akan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dalam bentuk pencapaian kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Dengan demikian, penulis akan memfokuskan tulisan ini

ke dalam pembahasan tentang kepentingan UEA terhadap Israel demi mencapai tujuan negara dalam hal politik, ekonomi, dan militer atau keamanan.

Dengan kekuatan yang besar, maka negara dapat secara efektif mengejar kepentingan nasionalnya. Namun, hal itu menghasilkan persaingan dan konflik antar negara yang mengarah pada anarki internasional atau kekacauan dunia. Itulah sebabnya mengapa negara harus mengejar keseimbangan kekuatan untuk mencegah dominasi negara lain (Sutch & Elias, 2007: 54-56). Keseimbangan kekuatan hanya dapat dicapai melalui sistem dunia yang bipolar seperti pada saat era Perang Dingin (Sutch & Elias, 2007: 57-58). Salah satu teori keseimbangan yang dapat digunakan sebagai alat analisis dikenal dengan sebutan *balance of power* (keseimbangan kekuatan). Menurut Josep Nye, keseimbangan kekuatan merupakan arah kebijakan suatu negara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap negara-negara yang mengembangkan kekuatan dan menimbulkan ancaman (Nye, 2002). Di sisi lain, Mohtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi menjelaskan bahwa konsep keseimbangan kekuatan memiliki arti yang berbeda, yaitu melalui kebijakan nasional tertentu. Konsep ini menjelaskan bahwa keseimbangan kekuatan dapat tercapai melalui kebijakan nasional yang mendorong terbentuknya aliansi yang bersifat defensif demi mencegah agar suatu negara tidak bisa memperoleh posisi yang dominan (Mas'ood, 1990).

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis pembahasan dengan konsep normalisasi. Menurut Barston, istilah normalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah konflik lewat beberapa cara seperti di antaranya: gencatan senjata, perjanjian damai, atau membangun hubungan diplomatik (Barston, 2014: 52).

Hubungan Antara UEA dengan Israel Pra-Normalisasi

UEA didirikan 23 tahun setelah kemerdekaan Israel. UEA tidak pernah mengambil bagian dalam perang melawan Israel, akan tetapi kebijakan dan sikapnya mencerminkan ketidaksepahaman serta perlawanan terhadap Israel. Untuk memahami sifat hubungan UEA-Israel, maka penting untuk melihatnya dari sisi kondisi geopolitik kedua negara tersebut. UEA secara geografis jauh dari Israel, terletak di pantai selatan Teluk Persia. Dengan kondisi yang berjauhan, maka kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka menjadi kecil. UEA adalah negara monarki dengan mayoritas warga aslinya Arab Sunni namun setengah populasi negara ini adalah ekspatriat dari berbagai bangsa. Sementara itu, Israel menggunakan sistem demokrasi, masyarakatnya mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa dan ada minoritas Arab Sunni (orang Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai Israel).

Sejak terbentuknya Gulf Cooperation Council (GCC) tahun 1981, negara-negara anggotanya yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA telah mengambil posisi yang jelas, yaitu menentang pendudukan Israel terhadap Palestina dan turut mengupayakan penyelesaian konflik di antara mereka. Selain sering mengecam kebijakan Israel terhadap Palestina, UEA juga sering mendukung berbagai inisiatif perdamaian baik dari skala regional maupun dunia, misalnya dukungan terhadap Arab Peace Initiative yang diprakarsai oleh Arab Saudi. Negara-negara Teluk, termasuk UEA, menganggap resolusi konflik sebagai sumber stabilitas regional dan cara untuk menghilangkan gerakan radikal yang beroperasi di kawasan tersebut. UEA dan negara anggota GCC lainnya memandang solusi dua negara sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Rabi & Mueller, 2017).

Hubungan antara Israel dan UEA seringkali dipengaruhi oleh posisi mereka di poros kekuasaan politik (*political axes of power*). Di kawasan, UEA dan Israel dianggap sebagai negara yang pro-AS. AS memang memelihara hubungan dekat dengan UEA, dan hubungan ini bergantung pada aliansi strategis berdasarkan kepentingan diplomatik, keamanan, dan ekonomi bersama (Katzman, 2018). Sejak didirikan, UEA telah mendukung keputusan Liga Arab dan GCC terkait Israel. Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak untuk mengakui Israel (UEA Federal Law No. 15/1972, 1972), dan secara resmi melarang masuk warga Israel ke dalam wilayahnya sesuai dengan kebijakan boikot terhadap Israel oleh Liga Arab (Dubai Online, 2018).

Kepentingan Politik antara UEA dan Israel

Israel dan UEA tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun pejabat kedua negara diketahui berkali-kali melakukan pertemuan. Pada bulan September 2012 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, PM Israel, Netanyahu dan Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, melakukan pertemuan rahasia. Kejadian ini baru diketahui beberapa tahun kemudian setelah media Israel, Haaretz, melaporkannya (Ravid, 2017). Pertemuan tersebut membahas kepentingan kedua negara yang sama, yaitu untuk menggagalkan rencana pengembangan nuklir Iran.

Pada November 2015, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Dore Gold, melakukan kunjungan ke UEA. Tujuan kunjungannya adalah untuk membahas pembukaan kantor misi Israel untuk International Renewable Energy Agency (IRENA) (Ravid, 2015). Meskipun tema utama dalam beberapa pertemuan tersebut didedikasikan untuk kerja sama di bawah badan-badan internasional, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di sana sebenarnya terdapat agenda lain yang terselubung. Maryam Khalifa al-Falasi, Kepala Komunikasi dan Media di Kementerian Luar Negeri UEA, kemudian mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi pertemuan

tersebut. Dia menjelaskan bahwa IRENA adalah lembaga internasional dan independen, memiliki norma dan hukumnya sendiri, dan bahwa pembukaan misi Israel tidak mencerminkan perubahan posisi UEA terhadap Israel atau hubungan antara kedua negara (Al Falasi, 2015). Perwakilan paling senior Israel yang ikut serta dalam konferensi dan pertemuan tersebut adalah Menteri Infrastruktur Uzi Landau (2010); Menteri Infrastruktur Nasional, Energi, dan Air Silvan Shalom (2014); dan Menteri Energi Yuval Steinitz (2016) (Ravid, 2015).

Jauh sebelumnya, yaitu tahun 2003, delegasi Israel yang berjumlah sekitar 80 orang melakukan kunjungan ke Dubai, UEA untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh International Monetary Fund (IMF). Peserta delegasi ini di antaranya adalah mantan Menteri Keuangan Meir Sheetrit, Gubernur Bank Israel David Klein, dan beberapa pebisnis Israel (Koren, 2003).

Pada November 2016, Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, melakukan kunjungan resmi ke UEA, sebagai bagian dari kegiatannya sebagai ketua Komite Hukum (Legal Committee) PBB (Segal, 2016). Berawal dari pertemuan tersebut, berikutnya mulai dilakukan pertemuan lainnya seperti pada saat turnamen Judo yang diadakan di Abu Dhabi pada tahun 2018. Pada turnamen ini, pimpinan Abu Dhabi mengizinkan atlet Israel untuk berkompetisi mewakili negaranya (Times of Israel, 2018). Kemudian pada 2019, mantan Menteri Luar Negeri dan Intelijen Israel, Yisrael Katz, mengunjungi Abu Dhabi sebagai peserta konferensi yang ditunjuk PBB (Barghoti, 2019). Berbagai pertemuan yang terjadi antara pejabat kedua negara menunjukkan bahwa ada upaya-upaya politik yang telah dilakukan dan ada kepentingan politik di antara keduanya.

Kepentingan Keamanan antara UEA dan Israel

Kepentingan UEA terhadap drone milik Israel dan produk keamanan lainnya telah disebutkan dalam berbagai laporan selama bertahun-tahun (Khan, 2015). Kepentingan militer UEA secara spesifik terkait dengan angkatan udara. Beberapa media melaporkan bahwa angkatan udara Israel dan UEA telah berpartisipasi bersama dalam beberapa kegiatan, setidaknya dalam tiga kali latihan militer yang disponsori pihak ketiga seperti AS dan Italia (Cohen, 2017). Aspirasi UEA untuk mengembangkan angkatan udaranya mengarah pada hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Israel ketika pada Juli 2018, sebuah delegasi militer dari UEA dilaporkan tiba di Israel untuk memeriksa pesawat F-35 yang dibeli Israel dari AS (i24News, 2018).

AS, Israel, dan UEA sepakat untuk memperluas kerja sama di bidang militer sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Iran di kawasan. Selain itu UEA juga memang berencana untuk meningkatkan kekuatan di kawasan dalam rangka merespons serangan militer yang terjadi di Afghanistan, Yaman, dan Libya dalam beberapa tahun

terakhir ini (Kirkpatrick, 2020). Motivasi utama lainnya bagi UEA adalah untuk meningkatkan kemampuan persenjataan militernya. UEA merupakan salah satu negara yang mengimpor senjata AS dalam jumlah besar. Nilai impor tersebut sekitar 20 miliar USD dari anggaran pertahanan tahunannya yang sebesar 23 miliar USD. Dengan adanya normalisasi, Israel berharap mendapatkan akses yang lebih besar untuk masuk ke pasar militer UEA (Amit, 2020).

Kasus lainnya, ketika AS ingin menjual jet tempur F-35 dan drone bersenjata ke UEA, pihak Israel menentangnya. Mereka beralasan bahwa hal tersebut dapat mengancam stabilitas kawasan. Dengan demikian, dalam sudut pandang UEA, jika mereka melakukan normalisasi dengan Israel, maka pembelian jet tempur F-35 dapat dilanjutkan (Zilber, 2020).

Menanggapi kesepakatan Abraham Accord, Riad Kahwaji selaku analis keamanan dan pertahanan Timur Tengah yang berbasis di Dubai, menyatakan bahwa akan ada beberapa peluang kolaborasi antara UEA dan Israel, termasuk dalam bidang keamanan siber dan sistem pertahanan canggih. Dia menyampaikan:

“Cybersecurity is one of the areas which could witness industrial cooperation between the UAE and Israel, and the latter has a strong edge in this area, also in unmanned autonomous systems, unmanned aircraft, missile defense, electronic systems, and system integration. These are all areas where there is potential cooperation.” (Helou, 2020)

Dari pernyataan di atas, sebagaimana dilansir dari Defense News, keamanan siber merupakan salah satu bidang potensial yang dapat digarap bersama oleh UEA dan Israel. Israel memiliki keunggulan di bidang ini, dan selain itu mereka juga menguasai teknologi pesawat tak berawak, pertahanan rudal, sistem elektronik, dan sistem integrasi. Israel juga sebenarnya telah menjual beberapa produk keamanan untuk UEA, khususnya dalam bidang siber dan pengawasan. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Lab Universitas Toronto, UEA ditenggarai telah memiliki teknologi spyware (perangkat pengintai) untuk pengawasan situasi politik. Perangkat tersebut diproduksi oleh Grup NSO Israel (Barrington & Williams, 2020).

Salah satu alasan mengapa pemerintah UEA berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi keamanan dan pertahanannya adalah karena adanya merasa bahwa muncul banyak ancaman dari negara-negara lain di kawasan. Terutama sejak 2015, Arab Saudi menyerang Yaman untuk menghancurkan perlawanan kelompok Houthi. Arab Saudi dan negara-negara sekutunya, termasuk UEA, menuduh Iran sebagai penyokong kelompok Houthi. Mereka mengkhawatirkan bahwa Iran memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini memicu Arab Saudi

mendirikan aliansi dengan negara-negara lainnya seperti Bahrain, UEA, Qatar, Kuwait, Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan yang dinamakan dengan Decisive Storm (Budiman, 2016).

Hal lainnya, pada tahun 2016 ketika Arab Saudi mengeksekusi Nimr al-Nimr, salah satu tokoh Syiah Arab Saudi yang memperjuangkan kesetaraan antara Syiah dan Sunni, massa di Iran bereaksi dengan melakukan penyerangan terhadap kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan Konsulat Arab Saudi di Mashhad, Iran. Atas peristiwa ini Arab Saudi kemudian menilai bahwa Iran merupakan negara yang terus melanggar peraturan internasional dan mereka berupaya untuk mengasingkan negara ini di kawasan. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara koalisi, salah satunya adalah UEA yang semenjak itu menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Iran (Zimmt, 2017).

Semenjak itu, para pemimpin UEA sepakat untuk meningkatkan keamanan serta pertahanannya dalam merespons "kebijakan agresif" Iran. UEA melihat Iran dan jaringan pasukan proksinya di Yaman, Lebanon, dan Irak sebagai ancaman utama di kawasan tersebut (Ibish, 2017). Sebagai respons, Abu Dhabi lalu memperkuat aliansinya dengan AS, Arab Saudi, dan Mesir, salah satunya adalah dengan cara menghadirkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS di Pangkalan Udara Al Dhafra dan Pelabuhan Jebel Ali untuk memperkuat keamanan mereka (Katzman, 2019).

UEA kemudian terus membeli peralatan militer yang modern dan berteknologi canggih. Sejak tahun 2013, UEA telah menambahkan 30 unit F-16. Abu Dhabi juga membangun hubungan bilateral dalam bidang-bidang strategis seperti keamanan, politik, dan kebudayaan dengan Washington sejak 2014 dalam sebuah bentuk kerjasama yang disebut dengan Joint Statement Strategic Dialogue. Selain itu, UEA juga berpartisipasi dalam KTT AS-GCC di Camp David pada Mei 2015, yang menegaskan kembali komitmen kerja sama dengan AS terhadap keamanan Teluk (Mason, 2018). Pada 2015, UEA juga mendapatkan amunisi (Unit Bom Terpandu - GBU-31 dan GBU-12) untuk digunakan melawan kelompok Houthi di Yaman. UEA bahkan telah mengembangkan industri pertahanannya sendiri (Katzman, 2018). Semenjak Perang Yaman, UEA juga mulai berinvestasi di bidang keamanan siber, menggunakan teknologi untuk memerangi penjahat dunia maya dan perlawanan politik domestik (Ibish, 2017:32).

Selain itu, UEA telah berupaya untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanannya. Selain meningkatkan kerja sama militernya dengan Prancis, UEA telah membuka jalur baru kerja sama militer dengan Rusia. Abu Dhabi juga telah menyelesaikan perjanjian kerja sama pertahanan dengan India pada 2015 dan menandatangani kembali

"Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif" pada 2017 dengan mereka (Katzman, 2018). Pada Mei 2019, AS dan UEA juga telah mengumumkan implementasi pakta kerja sama pertahanan baru dengan durasi 15 tahun, yang akan meningkatkan koordinasi dan latihan militer antara kedua negara (Hernandez, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, UEA juga telah mengimplementasikan program modernisasi dan pengembangan militer yang mencakup Angkatan Laut, Udara, dan Darat dengan senjata-senjata canggih terbaru. UEA bahkan mampu membangun sistem pertahanan udara dan rudal yang memiliki sistem pertahanan udara AS yang paling canggih (PAC-3). Mereka telah menerapkan program rekrutmen wajib militer sejak Mei 2014, untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata mereka (Kahwaji & Khan, 2014).

Kepentingan Ekonomi Antara UEA dan Israel

Kerja sama ekonomi antara kedua negara telah terjalin pra-normalisasi. Misalnya, kerja sama dalam bidang keamanan siber (cyber security) dan bidang terkait lainnya (meliputi alat intelijen) yang biayanya mencapai 3 miliar USD (Barakat, 2020). Pada tahun 2020, kerja sama kedua negara semakin meningkat khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan. Pada bulan Mei, perusahaan penerbangan UEA, Etihad Airways, melakukan penerbangan bersejarah dan tak terduga ke Tel Aviv untuk pertama kalinya, untuk menyalurkan bantuan medis pandemi COVID-19 yang rencananya akan dikirimkan ke Otoritas Palestina melalui Israel (Aljazeera, 2020a).

Menurut data dari IMF, UEA mengalami peningkatan pendapatan dari sektor non-minyak sekitar lebih dari 6% antara tahun 2014 hingga 2015. Di sisi lain, daya beli masyarakat dan belanja pemerintah UEA dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan (IMF, 2015). UEA juga merupakan salah satu aktor penting bagi perekonomian di kawasan Timur Tengah, terutama karena pelabuhan Jebel Ali yang dianggap sebagai yang terbesar dan terpenting di kawasan (the World Shipping Council Index, 2020).

Sejak tahun 1979, pemerintah UEA mulai mengambil kebijakan ekonomi lain untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak. Kemudian, karena jatuhnya harga minyak pada tahun 1982 yang menyebabkan perekonomian UEA mengalami defisit, pemerintah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan perluasan aktivitas produksi di sektor non-minyak. Aktivitas produksi tersebut di antara lain termasuk dalam bidang pariwisata, transportasi udara, perdagangan, jasa keuangan, manufaktur, dan energi alternatif (UAE Government, 2020).

Akibat pandemi Coronavirus (COVID-19), UEA memperkirakan ekonomi pada sektor non-minyaknya akan berkontraksi sebesar 4,1% di tahun 2020. Ditambah lagi,

pertumbuhan investasi asing juga diasumsikan turun dari 8% antara 2017 dan 2018 yang mengakibatkan perekonomian mereka terpuruk (Al Lawati, 2020). Merespons hal tersebut, UEA telah mengumumkan restrukturisasi aparaturnya sebagai bagian dari pengambilan keputusan di tengah pandemi, hal tersebut guna menggabungkan berbagai entitas pemerintahan agar sinergis. Selain itu mereka juga menunjuk Menteri Ekonomi dan Industri yang baru.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, selaku Wakil Presiden dan PM UEA, melalui akun Twitter resminya menjelaskan alasan restrukturisasi tersebut:

“Our goal of structural changes today is a government that is faster in decision-making.... and is more up to date with changes.... and better in seizing opportunities and in dealing with the new stage in our history.... a flexible and fast government whose goal is to consolidate the achievements and gains of the country.” (Aljazeera, 2020b)

Sheikh Mohammed memberikan waktu satu tahun agar negara dapat mencapai target prioritas dalam bidang bisnis, perdagangan, dan pariwisata. Dengan target seperti ini maka sangat memungkinkan jika hubungan antara UEA dan Israel diharapkan dapat membantu terciptanya jalur perdagangan baru, yaitu melalui ekspor produk Israel ke timur dan produk UEA ke barat dan Mediterania. Selain potensi tersebut, kedua negara juga dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan langsung antar mereka.

Kedua negara juga memiliki potensi wisata religi, sebab salah satu tempat suci bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, berada di wilayah yang dikuasai Israel. Agama merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Israel dan UEA. Kedua negara juga telah mengadopsi norma toleransi beragama. Apabila ada kerja sama di bidang wisata religi, maka kedua negara dapat memperkuat budaya unik toleransi beragama melalui dialog antar agama dan menciptakan peluang tambahan untuk bertemunya Yahudi dan Muslim (Walla, 2017).

Selanjutnya, hubungan perdagangan kedua negara berfokus pada ekspor dari Israel ke UEA, bukan sebaliknya. Jenis komoditas yang saat ini diekspor dari Israel ke UEA termasuk peralatan medis, telekomunikasi, bahan mentah, produk pertahanan, mesin dan teknik, jasa konsultasi, dan produk terkait pertanian dan makanan. Barang-barang ekspor ini sepertiganya masuk melalui jalur resmi negara dan mereka tidak diberi label atau tanda produk tertentu demi menjaga kerahasiaan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Israel. Berdasarkan percakapan dengan perusahaan Israel yang berbisnis di UEA, mereka mengungkapkan bahwa para pebisnis UEA menghargai kerja sama dengan Israel. Beberapa tender di UEA secara eksplisit menyebutkan larangan perdagangan

dengan Israel, tetapi dalam banyak kasus, hal itu dalam praktiknya tidak diberlakukan (Zaga, 2018).

Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan bisnis lainnya antara UEA dengan Israel sebelum adanya normalisasi hubungan:

1. Pada tahun 2008 AGT International, sebuah perusahaan milik pengusaha asal Israel Mati Kochavi, dikontrak oleh pemerintah Abu Dhabi untuk memasang alat-alat elektronik, sistem sensor, dan kamera untuk memantau perbatasan dan mengamankan ladang minyak dan gas alam (Ferzinger & Waldman, 2017).
2. Perusahaan AGT International yang berbasis di Swiss, menyediakan produk teknologi Israel yang mengontrak dua perusahaan lokal asal UEA untuk dapat bekerja di sana sebagai perusahaan eksternal. Kesepakatan itu bernilai sebesar 6 miliar USD menurut Bloomberg (Ferzinger & Waldman, 2017).
3. Pembukaan toko berlian di Dubai oleh perusahaan asal Israel, yakni LevLeviev Group (Hazani, Pauzner, & Sikuler, 2009).
4. Adanya proyek bersama antara pengusaha Israel Yitzhak Tshuva dan pejabat pemerintah dari UEA, salah satunya pembangunan Hotel Plaza yang dimiliki oleh Tshuva di UEA (Hazani, 2008).
5. Pada tahun 2009 kerja sama bisnis dilakukan antara Israel Ofer Brothers Group dan UEA di sektor perkapalan. Selain itu ada juga kerja sama antara pengusaha Israel Beny Steinmetz dengan pejabat pemerintah UEA terkait proyek energi dan hotel (Hazani, Pauzner, & Sikuler, 2009).

Setelah kesepakatan normalisasi, UEA dan Israel akan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang ekonomi, termasuk investasi. Menurut pernyataan dari Ziva Eger, selaku Kepala Eksekutif Investasi Israel, ekosistem Israel memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada ekonomi UEA dalam hal inovasi, khususnya di bidang ilmu hayati, teknologi kebersihan, teknologi agrikultur, dan energi. Pihak Investasi Abu Dhabi (ADIO) yang dikelola pemerintah UEA, yang diwakili oleh Tariq Bin Hendi selaku Direktur Jenderal ADIO, merespons bahwa tim hubungan investornya akan memfasilitasi koneksi di seluruh ekosistem Abu Dhabi untuk meningkatkan kerja sama dengan kantor investasi Israel (Rufinaldo, 2020).

Sementara itu dalam sektor keuangan, First Abu Dhabi Bank (FAB) PJSC, bank terbesar di UEA, telah memulai pembicaraan dengan Bank Hapoalim dan Bank Leumi asal Israel. Mereka membahas rencana tentang upaya membangun hubungan perbankan yang akan memperkuat kerja sama keuangan dan ekonomi antara UEA dengan Israel (Pryanka, 2020). Kedua belah pihak juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU/Nota Kesepahaman). Berdasarkan MoU

tersebut, kedua bank setuju untuk meningkatkan hubungan dengan lembaga keuangan di kedua negara, menyediakan layanan seperti kliring, jalur kredit, dan perdagangan mata uang asing (Reuters, 2020a).

Respons Dunia Internasional dan Beberapa Negara Muslim Terhadap Normalisasi antara UEA dengan Israel

Masyarakat internasional melontarkan respons yang beragam terhadap kebijakan normalisasi UEA dengan Israel. Beberapa negara yang merespons dengan positif adalah Mesir, Yordania, Bahrain, Sudan, Inggris, dan Prancis. Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi, yang merupakan sekutu dekat UEA menghargai upaya UEA dan Israel untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Dia mengapresiasi peran AS, UEA, dan Israel yang berupaya untuk menghentikan aneksasi oleh pemerintah Israel di Palestina dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk membawa perdamaian di Timur Tengah (Reuters, 2020b).

Selanjutnya, Yordania mengatakan kesepakatan tersebut dapat mendorong terciptanya negosiasi perdamaian yang sempat terhenti, yaitu jika UEA berhasil mendorong Israel untuk menerima negara Palestina yang telah diduduki mereka sejak Perang Arab-Israel 1967. Yordania memberikan pernyataannya melalui Menteri Luar Negeri Ayman Safadi, "If Israel dealt with it as an incentive to end occupation... it will move the region towards a just peace" (Reuters, 2020c).

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan peluang dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah. Bahrain menyampaikan ucapan selamat kepada UEA, AS, dan Israel karena telah mencapai kesepakatan tentang penghentian perluasan wilayah Israel ke Palestina (Asmar, 2020a). Dewan Kementerian Sudan, Omer Ismail, juga turut menyambut baik langkah UEA-Israel, mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina (Kenny, 2020).

Dari negara Barat, PM Inggris, Boris Johnson, juga menyambut baik kesepakatan antara Israel dan UEA yang akan mengarah pada normalisasi penuh. Keputusan ini dianggap sebagai kabar baik bagi Inggris (Reuters, 2020d). Terakhir, Prancis menyambut baik adanya normalisasi hubungan antara Israel dan UEA, yang mana keduanya merupakan mitra penting bagi Prancis di wilayah tersebut. Menurut Prancis, keputusan yang dibuat untuk menanggukkan aneksasi Israel ke wilayah Palestina adalah suatu langkah positif yang perlu dibuat permanen (French Embassy, 2020).

Sebaliknya, sejumlah negara lain merespons dengan rasa kecewa dan marah terhadap keputusan UEA. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Javad Zarif,

mengatakan bahwa UEA sekarang telah menjadi mitra "kejahatan Israel". Dia juga menambahkan, bahwa tindakan tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan kawasan dan Dunia Islam. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga mengecam UEA dengan mengatakan telah "mengkhianati" Muslim (MEPEI, 2020). Lalu, Presiden Iran Rouhani memperingatkan bahwa apabila perjanjian tersebut bertujuan untuk memperluas wilayah Israel, maka cara penanganan Iran akan berbeda dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Baqeri juga memperingatkan bahwa, apabila terjadi sesuatu di Teluk Persia dan keamanan nasional Republik Islam Iran terancam, bahkan jika hanya sedikit saja, maka Iran akan menyalahkan UEA, dan tidak akan mentolerirnya (BBC, 2020).

Qatar merespons dengan meningkatkan simpatinya terhadap Palestina melalui distribusi bantuan bulanan sebesar 30 juta USD kepada penduduk Gaza dan mempromosikan Khaled Mashal sebagai pemimpin Hamas (Times of Israel, 2020). Di sisi lain, Turki mengambil tindakan untuk memperkuat kekuatan militer Hamas (TRT World, 2020). Lalu, sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat sipil Aljazair mengutuk dan menyebut perjanjian ini sebagai "pengkhianatan" terhadap perjuangan Palestina (MEPEI, 2020). Ketiga negara tersebut mempromosikan pendekatan politik Islam sebagai upaya perlawanannya terhadap normalisasi hubungan UEA dengan Israel.

Sementara itu bagi Palestina sendiri, selama bertahun-tahun UEA dianggap telah menunjukkan solidaritas dengan memberikan aspirasi terhadap Palestina. Palestina dan UEA merupakan anggota dari Liga Arab dan forum regional lainnya. UEA memiliki Kedubes di Palestina dan sekitar 100.000 warga Palestina tinggal dan bekerja di UEA. UEA juga sebelumnya secara terbuka dan tegas mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka (Nusseibeh, 2014).

Sebelum normalisasi, para pejabat UEA pernah memberikan berbagai pernyataan pro-Palestina. Misalnya, mantan Dubes UEA untuk PBB Lana Nusseibeh pernah mengkritik tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang menurutnya termasuk kejahatan perang. Dalam pidatonya dia menyatakan bahwa:

"Israel's security will be achieved when it fulfills its obligations as an occupying power, and demonstrates its political will to achieve true lasting peace in the region and cooperates in achieving a two-state solution based on pre-1967 borders." (Nusseibeh, 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas, Lana Nusseibeh mengatakan bahwa keamanan bagi Israel akan tercapai apabila mereka memenuhi kewajiban untuk bekerja sama

dalam mencapai solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967. Pidato tersebut juga merupakan cerminan sikap UEA terhadap Israel dan konflik Israel-Palestina.

Sementara itu Presiden UEA dan Amir Abu Dhabi Sheikh Khalifa Bin Zayed al-Nahyan pada November 2013 menyatakan:

“Today, we in the UAE are renewing our solidarity and our support for the Palestinian people in their just and legitimate struggle to end the Israeli occupation in their homeland and to fully recognize their national rights together with all other nations of the world.” (The National, 2013)

Sejak tahun 2015, UEA telah meningkatkan dukungan ekonomi dan politiknya untuk Muhammad Dahlan sebagai pemimpin Palestina berikutnya. Beberapa pihak melihat hal ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya situasi politik yang moderat dan pragmatis di Gaza dan untuk menyeimbangkan dukungan Qatar terhadap kelompok oposisi (Asseraf, 2017).

Pasca normalisasi, UEA berusaha menjelaskan bahwa posisinya terhadap Palestina tidak berubah. Dubes UEA untuk Prancis, Ali Abdullah al-Ahmed, mengatakan kepada Arab News bahwa posisi negaranya terhadap Palestina masih konsisten dengan solusi dua negara. Al-Ahmed mengatakan, keputusan UEA untuk memberikan pengakuan kepada Israel adalah karena ingin menunda perluasan wilayah yang dilakukan Israel ke Palestina (Takieddine, 2020). Al-Ahmed juga memberikan pernyataan tentang pentingnya kehadiran AS di kawasan:

“We are convinced that this trilateral agreement between the UAE, Israel and the US as a principal actor, especially with the strengthening of the US presence in our region, will contribute in enhancing peace, security and stability in the region.” (Takieddine, 2020)

Selain itu dia juga berkeyakinan bahwa jika Israel ingin hidup damai di kawasan Timur Tengah, maka harus ada kesepakatan dengan negara-negara Arab lainnya yang melayani kepentingan kedua belah pihak (Takieddine, 2020).

Namun, bagaimanapun kesepakatan normalisasi tersebut tetap menjadi sebuah pukulan berat bagi Palestina. Khususnya bagi Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, perjanjian ini merupakan demonstrasi kegagalan strateginya dalam melawan Israel di kawasan. Seiring dengan mendekatnya akhir pemerintahan Abbas, maka sangat memungkinkan jika ada kandidat lain yang sengaja ingin mengagalkan kemerdekaan Palestina untuk kepentingan politik, dia diduga adalah Muhammad Dahlan, yang didukung oleh UEA (Michael & Dekel, 2020).

Palestina kemudian meminta kepada Liga Arab untuk membuat sebuah rancangan komunikasi tentang pembatalan kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan UEA. Negara-negara Liga Arab menolak permintaan tersebut, mereka sepakat untuk lebih menekankan kepada kesepakatan akhir tentang komitmen Arab Peace Initiative 2002, solusi dua negara, dan *land-for-peace principle* (Asmar, 2020b). Akibat penolakan tersebut, pada 22 September 2020 Palestina akhirnya resmi melepaskan haknya sebagai Presiden Liga Arab. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA, Bahrain, dan Israel (Handayani, 2020).

Di sisi lain, Yousef Al-Othaimeen, selaku Sekretaris Jenderal OKI, memberikan sebuah pernyataan yang menentang normalisasi tersebut:

“Establishing normal relations between the member states of the organization and the Israeli occupation state will not be achieved until the end of the Israeli occupation of the Arab and Palestinian lands occupied since 1967, including al-Quds (Jerusalem).” (Nabulsi, 2020)

Al-Othaimeen menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI. Melakukan normalisasi hubungan antara anggota OKI dengan Israel tidak akan dilakukan sampai pendudukan Israel atas Palestina, termasuk pendudukan atas Jerusalem, diakhiri. Hingga saat ini, sejumlah negara tetap menyatakan perlawanannya terhadap Israel, seperti Arab Saudi, Bahrain, Brunei Darussalam, Djibouti, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yaman. Mereka tidak mengakui dan menerima Israel sebagai negara yang sah. Selain itu, tiga negara non-Muslim seperti Bhutan, Kuba, dan Korea Utara juga tidak mengakui Israel sebagai negara (Nashrullah, 2020).

Simpulan

Sebagai kesimpulan, terkait normalisasi hubungan UEA-Israel terdapat dua temuan, yaitu: (1) adanya kepentingan nasional UEA, yang meliputi kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi, dan (2) adanya dua jenis respons dari berbagai negara, khususnya dari negara-negara Muslim, yakni respons positif dan negatif.

Pertama, terkait kepentingan politik UEA dalam normalisasi ini, lebih banyak dipengaruhi oleh posisinya di poros kekuasaan politik (*political axes of power*), di mana UEA dan Israel merupakan negara yang pro-AS. Di bidang keamanan, UEA yang memiliki persepsi adanya ancaman dari pihak Iran, merasa perlu menjalin kerja sama keamanan, terutama pembelian senjata, dengan Israel yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dan industri militer. UEA mengkhawatirkan pengaruh Iran akan terus meluas hingga ke

kawasan Teluk Arab. Negara-negara kecil seperti UEA dalam memperkuat keamanan nasionalnya perlu untuk membentuk aliansi, meningkatkan kemampuan militer, dan terlibat dalam kerja sama dengan negara lainnya.

Di bidang ekonomi, UEA berharap normalisasi dengan Israel dapat meningkatkan ekonominya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa Israel memiliki kepentingan yang lebih besar ketimbang UEA. UEA juga melihat kerja sama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia, serta sebagai upaya untuk diversifikasi pendapatan negara.

Kedua, mengenai perbedaan respons dari berbagai negara, khususnya negara-negara Muslim. Sebagian negara Muslim merespons dengan positif, seperti Mesir, Yordania, Bahrain, dan Sudan. Alasan negara-negara ini adalah karena menghargai upaya UEA dan Israel untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Pemerintah UEA pun menyatakan masih konsisten mendukung Palestina dengan solusi dua negara dan menyatakan bahwa normalisasi ini sebagai upaya negaranya untuk menahan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Iran, Qatar, Turki, Aljazair, dan Palestina sendiri merespons dengan negatif. Sebagai tanggapan atas normalisasi ini, mereka mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memperkuat dukungan terhadap Palestina secara finansial dan memperkuat keamanan mereka. Bentuk lain atas ketidaksetujuan ini di antaranya juga disampaikan melalui pernyataan resmi negara. Di beberapa negara juga ditemukan aksi protes dari masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi untuk menentang normalisasi ini.

Daftar Pustaka

- Times of Israel. (2020). *Gaza families begin receiving Qatari aid payments*. [online]. Dalam: <https://www.timesofisrael.com/gaza-families-begin-receiving-qatari-aid-payments/#gs.gck25r> [Diakses 23 September 2020].
- Al Falasi, M. (2015). *UAE: Any Agreement Between IRENA and Israel Does Not Represent any Change in UAE Position*. UAE Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation.
- Al Lawati, A. (2020). *UAE Sees More Economic Pain Before a Fourth Quarter Recovery*. *Bloomberg*, [online]. Dalam: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-10/uae-sees-further-economic-pain-ahead-of-fourth-quarter-recovery> [Diakses 23 September 2020].

- Aljazeera. (2020a). *UAE's Etihad makes first known flight to Israel*. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2020/05/uae-etihad-flight-israel-200519193755928.html#:~:text=%22Etihad%20Airways%20operated%20a%20dedicated,The%20Associated%20Press%20news%20agency> [Diakses 23 September 2020].
- Aljazeera. (2020b). *UAE orders government shake-up as coronavirus hits economy*. [online] Dalam: <https://www.aljazeera.com/economy/2020/07/05/uae-orders-government-shake-up-as-coronavirus-hits-economy/> [Diakses 23 September 2020].
- Al-Monitor. (2020). *Egyptian news media warned not to criticize UAE-Israel deal*. [online] Dalam: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ban-media-criticism-uae-israel-peace-deal.html#ixzz6YsFJx6IQ> [Diakses 23 September 2020].
- Amit, H. (2020). *The Real Deal for Israel and the UAE is Weapons*. *Haaretz*, [online] Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-the-real-deal-for-israel-and-the-uae-is-weapons-1.9077725> [Diakses 11 Desember 2020].
- Asmar, A. (2020a). *Bahrain welcomes UAE, Israel normalization deal*. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/bahrain-welcomes-uae-israel-normalization-deal/1941224> [Diakses 23 September 2020].
- Asmar, A. (2020b). *Arab League drops resolution condemning UAE-Israel deal*. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/arab-league-drops-resolution-condemning-uae-israel-deal/1968115> [Diakses 23 September 2020].
- Asseraf, M. (2017). *The Emirati Money in Gaza at the expense of Qatar*. *Ida'at*, [online]. Dalam: <https://www.ida2at.com/uae-money-in-gaza-at-the-expense-of-qatar/> [Diakses 23 September 2020].
- Barakat, M. (2020). *UAE, Israel deal against democracy in Arab World: experts*. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/uae-israel-deal-against-democracy-in-arab-world-experts/1942797> [Diakses 11 Desember 2020].
- Barghoti, A. (2019). *Israel foreign minister visits Abu Dhabi*. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-foreign-minister-visits-abu-dhabi-/1520646> [Diakses 11 Desember 2020].

- Barrington, L., & Williams, D. (2020). UAE, Israeli ministers pledge defence cooperation. *Reuters*, [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-defence-idUSKBN25L1XP> [Diakses 23 September 2020].
- Barron, R. (2020). What Do Normalized Israel-UAE Relations Mean for the Region? [online] *The United States Institute of Peace*. Dalam: <https://www.usip.org/publications/2020/08/what-do-normalized-israel-uae-relations-mean-region> [Diakses 23 September 2020].
- Barston, R. (2014). *Modern Diplomacy*. New York: Routledge.
- BBC. (2020). *Iran*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/persian/iran-53797243> [Diakses 23 September 2020].
- Budiman, H. (2016). Kebijakan Luar Negeri Pakistan Menolak Bergabung ke Koalisi Militer Arab Saudi Dalam Menghadapi Konflik Yaman. *JOM FISIP*, [online] 3(1), 1-15. Dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/33077-ID-kebijakan-luar-negeri-pakistan-menolak-bergabung-ke-koalisi-militer-arab-saudi-d.pdf> [Diakses 11 Desember 2020].
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cohen, G. (2017). The Air Force holds a joint exercise with the United Arab Emirates, the United States and Italy in Greece. *Haaretz*, [online]. Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-air-force-holds-joint-exercise-with-united-arab-emirates-1.5454004> [Diakses 11 Desember 2020].
- Donaghy, R. (2016). *Abu Dhabi announces launch of Israeli-installed mass surveillance system*. [online] Middle East Eye. Dalam: <https://www.middleeasteye.net/news/abu-dhabi-announces-launch-israeli-installed-mass-surveillance-system> [Diakses 23 September 2020].
- Dubai Online. (2018). *Dubai Visa and Immigration*. [online]. Dalam: <https://www.dubai-online.com/essential/immigration/> [Diakses 23 September 2020].
- Eran, O. (2011). *Normalization between Israel and Arab States: Is the Idea Still Viable?* [online] Institute for National Security Studies. [online] Dalam: <http://www.jstor.org/stable/resrep08574> [Diakses 11 Desember 2020].
- Ferzinger, J., & Waldman, P. (2017). How Do Israel's Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very Quietly. *Bloomberg Business Week*, [online]. Dalam: <https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech-firms-do-business-in-saudi-arabia-very-quietly> [Diakses 11 Desember 2020].

- French Embassy. (2020). *France welcomes normalization of UAE-Israel relations*. [online] France in the United Kingdom. Dalam: <https://uk.ambafrance.org/France-welcomes-normalization-of-UAE-Israel-relations> [Diakses 23 September 2020].
- Haaretz. (2020). *'Historic Diplomatic Breakthrough': Read the Full Statement on Israel-UAE Agreement*. [online]. Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/historic-diplomatic-breakthrough-read-the-full-statement-on-israel-uae-agreement-1.9070792> [Diakses 23 September 2020].
- Handayani, R. (2020). Palestina Pilih Mundur dari Kepresidenan Liga Arab. *Republika*, [online]. Dalam: <https://republika.co.id/berita/qh3aw1430/palestina-pilih-mundur-dari-kepresidenan-liga-arab> [Diakses 24 September 2020].
- Hazani, G. (2008). Tshuva is looking for business in Dubai. *Ynet*, [online]. Dalam: <https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3533987,00.html> [Diakses 23 September 2020].
- Hazani, G., Pauzner, S., & Sikuler, N. (2009). *From Tshuva to Leviev: The Israelis Who Have Done Business with the Principality of Dubai*. Tel Aviv-Yafo: Calcalist.
- Helou, A. (2020). What kind of industrial cooperation will improved Israel-UAE relations produce? *Defense News*, [online]. Dalam: <https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/08/26/what-kind-of-industrial-cooperation-will-improved-israel-uae-relations-produce/> [Diakses 24 September 2020].
- Hernandez, M. (2019). US, UAE enter new defense cooperation pact. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/americas/us-uae-enter-new-defense-cooperation-pact/1492622> [Diakses 24 September 2020].
- Hitman, G. & Kertcher, C. (2018). *The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict*. Ariel, West Bank: Ariel University Press.
- i24News. (2018). *Exclusive: Israel Hosted UAE Military Delegation to Review F-35s, Sources Say*. [online]. Dalam: <https://www.i24news.tv/en/news/israel/178686-180704-sources-tell-i24news-israel-hosted-uae-military-delegation-to-review-f-35s> [Diakses 24 September 2020].
- Ibish, H. (2017). *The UAE's Evolving National Security Strategy*. [online] The Arab Gulf States Institute. Dalam: https://agsiw.org/wp-content/uploads/2017/04/UAE-Security_ONLINE-2.pdf [Diakses 24 September 2020].
- IMF. (2015). *Regional economic outlook. Middle East and Central Asia*. [online]. Dalam: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/menap1015.pdf> [Diakses 24 September 2020].

- Kahwaji, R., & Khan, S. (2014). *Success of the UAE defense strategy: achievements and outlook*. [online] Institute for Near East and Gulf Military Analysis. Dalam: www.inegma.com/downloads/reports/NationalDay2014/blast/National [Diakses 24 September 2020].
- Katzman, K. (2018). *The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
- Kenny, P. (2020). Sudan not next to normalize Israel relations: Official. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/africa/sudan-not-next-to-normalize-israel-relations-official/1984910> [Diakses 25 September 2020].
- Khan, T. (2015). UAE a step closer to buying US Predator drones. *The National*, [online]. Dalam: <https://www.thenationalnews.com/world/uae-a-step-closer-to-buying-us-predator-drones-1.113279?videoid=5766484581001> [Diakses 25 September 2020].
- Kirkpatrick, D. (2020). The Most Powerful Arab Ruler Isn't M.B.S. It's M.B.Z. *The New York Times*, [online]. Dalam: <https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-mohammed-bin-zayed.html> [Diakses 25 September 2020].
- Koren, A. (2003). On Monday, the Israeli delegation will leave for the International Monetary Fund convention. *News1*, [online]. Dalam: <https://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=30351&subjectid=1> [Diakses 25 September 2020].
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mason, R. (2018). Breaking the mold of small state classification? The broadening influence of United Arab Emirates foreign policy through effective military and bandwagoning strategies. *Canadian Foreign Policy Journal*, 24(1), 96-97.
- MEPEI. (2020). *Bahrain-Israel Deal*. [online] Middle East Political and Economic Institute. Dalam: <https://mepei.com/bahrain-israel-deal/> [Diakses 23 September 2020].
- Michael, K., & Dekel, U. (2020). *Israel-UAE Normalization of Relations: At the Expense of the Palestinians?* [online] INSS Insight. Dalam: <https://www.inss.org.il/publication/israel-uae-and-the-palestinians/> [Diakses 25 September 2020].
- Morgenthau, H. (2006). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Boston: McGraw-Hill.

- Nabulsi, E. (2020). No normalization until Israel ends occupation: OIC. *Anadolu Agency*, [online] Dalam: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/no-normalization-until-israel-ends-occupation-oic/1951994> [Diakses 25 September 2020].
- Nashrullah, N. (2020). Mesra dengan Israel, OKI dan Liga Arab Bubar Jalan? *Republika*, [online]. Dalam: <https://republika.co.id/berita/qfrsav318/mesra-dengan-israel-oki-dan-liga-arab-bubar-jalan> [Diakses 24 September 2020].
- Nusseibeh, Z. L. (2014). *The Question of Palestine. Permanent Mission of the United Arab Emirates to the United Nations*. [online] United Nations. Dalam: https://www.un.int/uae/statements_speeches/question-palestine [Diakses 24 September 2020].
- Nye, J. (2002). *The Paradox of American Power*. New York: Oxford University Press.
- Pryanka, A. (2020). Bank Terbesar di UEA Jajaki Kerja Sama dengan Bank Israel. *Republika*, [online]. Dalam: <https://republika.co.id/berita/qg2bf4383/bank-terbesar-di-uea-jajaki-kerja-sama-dengan-bank-israel> [Diakses 24 September 2020].
- Rabi, U. & Mueller, C. (2017). The Gulf Arab States and Israel since 1967: From 'No Negotiation' to Tacit Cooperation. *British Journal of Middle East Studies*, 44(4), 576-592.
- Ravid, B. (2015). Exclusive: Israel to Open First Diplomatic Mission in Abu Dhabi. *Haaretz*, [online]. Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-open-diplomatic-mission-in-abu-dhabi-1.5426578> [Diakses 24 September 2020].
- Ravid, B. (2017). Exclusive: Netanyahu secretly met with UAE Foreign Minister in 2012 in New York. *Haaretz*, [online]. Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york-1.5432342> [Diakses 24 September 2020].
- Reuters. (2020a). *Israel's Leumi signs deals with First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD*. [online]. Dalam: <https://uk.reuters.com/article/israel-emirates-bankruptcy-int/israels-leumi-signs-deals-with-first-abu-dhabi-bank-emirates-nbd-idUSKBN2661ZZ> [Diakses 24 September 2020].
- Reuters. (2020b). *Egypt's Sisi welcomes UAE-Israel deal, halt to annexation of Palestinian lands*. [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-egypt-idUSKCN2592SX> [Diakses 23 September 2020].

- Reuters. (2020c). *Jordan says Israel-UAE deal should prod Israel to accept Palestinian state*. [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-jordan-idUSKCN2592WN> [Diakses 23 September 2020].
- Reuters. (2020d). *UK's Johnson welcomes deal to normalise Israel-UAE relations*. [online]. Dalam: <https://in.reuters.com/article/us-israel-emirates-britain/uks-johnson-welcomes-deal-to-normalise-israel-uae-relations-idUSKCN2592KK> [Diakses 26 September 2020].
- Rufinaldo, R. C. (2020). *Israel dan UEA akan meluncurkan kerja sama finansial dan investasi*. *Anadolu Agency*, [online]. Dalam: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-dan-uea-akan-luncurkan-kerja-sama-finansial-dan-investasi/1960375> [Diakses 24 September 2020].
- Segal, U. (2016). The surprising visit of the Israeli ambassador to the UN: Danon was received in Dubai. *Mako News*, [online]. Dalam: https://www.mako.co.il/news-military/israel-q4_2016/Article-af85a4fbc5b2851004.htm [Diakses 24 September 2020].
- Sevunts, L. (2020). Canada welcomes normalization of relations between Israel and U.A.E. *Radio Canada International*, [online]. Dalam: <https://www.rcinet.ca/en/2020/08/14/canada-welcomes-normalization-of-relations-between-israel-and-u-a-e/> [Diakses 24 September 2020].
- Sutch, P., & Elias, J. (2007). *International Relations: The Basic*. Oxfordshire: Routledge.
- Takieddine, R. (2020). UAE position on Palestine in line with Arab consensus, says diplomat. *Arab News*, [online]. Dalam: <https://www.arabnews.com/node/1719976/middle-east> [Diakses 24 September 2020].
- Teitelbaum, J. (2009). *The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospect*. Jerusalem Center for Public Affairs.
- The National. (2013). *Khalifa Pledges Solidarity with Palestinians*. [online]. Dalam: <https://www.thenational.ae/uae/khalifa-pledges-solidarity-with-palestinians-1.294948> [Diakses 24 September 2020].
- Times of Israel. (2018). *Israel wins second judo gold in Abu Dhabi, 'Hatikva' plays again*. [online]. Dalam: <https://www.timesofisrael.com/israel-wins-second-judo-gold-in-abu-dhabi/> [Diakses 24 September 2020].
- TRT World. (2020). *Hamas hails Turkey's intra-Palestine unity efforts as Israel bombs Gaza*. [online]. Dalam: <https://www.trtworld.com/middle-east/hamas-hails-turkey-s-intra-palestine-unity-efforts-as-israel-bombs-gaza-39262> [Diakses 23 September 2020].

- UAE Federal Law No. 15/1972. (1972). Federal Law No. 15/1972 of the United Arab Emirates concerning the Boycott of Israel. UAE official government.
- UAE Government. (2020). *Features of the UAE's solid economy*. [online] The United Arab Emirates' Government Portal. Dalam: <https://cutt.ly/VhZu2Dy> [Diakses 7 Desember 2020].
- Walla. (2017). *The king called for the end of the Arab boycott and the delegation from Bahrain arrived for a rare visit to Israel*. [online]. Dalam: <https://news.walla.co.il/item/3118267> [Diakses 11 Desember 2020].
- World Shipping Council Index. (2020). *Top 50 World Containers Ports*. [online] World Shipping Council. Dalam: <http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports> [Diakses 23 September 2020].
- Zaga, M. (2018). *Israel and the United Arab Emirates: Opportunities on Hold*. the Mitvim Institute.
- Zilber, N. (2020). *Peace for Warplanes?*. [online] Foreign Policy. Dalam: <https://foreignpolicy.com/2020/08/31/israel-uae-peace-deal-f-35-arms-sales-palestine/> [Diakses 23 September 2020].
- Zimmt, R. (2017). Crisis in Iran-Saudi Arabia Relations. [online] Terrorisme Info. Dalam: http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20941/E_015_16_1824103176.pdf [Diakses 24 September 2020].